

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH  
SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA BILANTE  
KECAMATAN LAROMPONG  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**YESI RUSMAN**

19 0401 0218

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH  
SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA BILANTE  
KECAMATAN LAROMPONG  
KABUPATEN LUWU)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**YESI RUSMAN**

19 0401 0218

**Pembimbing**

**Agung Zulkarnain, S.E., M.E**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YESI RUSMAN

NIM : 19 0401 0218

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2023  
yang membuat pernyataan

YESI RUSMAN


NIM 19 0401 0218

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Yesi Rusman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0218, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Syawal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 01 Juni 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Fasiha, S. E.I., M. EI.             | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A. | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.               | Penguji I         | (  ) |
| 4. Mursyid, S. Pd., M.M.                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Agung Zulkarnain, S.E., M.E.            | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takhir, S. H., M. H.  
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, S. E.I., M. EI.  
NIP. 19810213 200604 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”**

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rusman Yamin dan ibunda Lismayana, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada

anak- anaknya serta nenek dan kakek saya yang selama ini membantu mendoakanku. Semoga Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ilham, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, beserta Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yaitu Kadir Arno, SE., Sy. M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Agung Zulkarnain, S.E., M.E Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Yuyun Ruqiyyat Said, S.Pd M.Pd, selaku dosen Penasehat Akademik.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Dan khususnya Kepada teman saya Indra wahyuni yang selalu membantu dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, Aamiin

Palopo, 13 Februari 2023

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ( ` ).

## 2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Na ma
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan terhadap penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## 11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis..Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	17
1. Implementasi .....	17
2. Kebijakan Publik .....	24
3. Kemiskinan .....	28
4. Program Bantuan Rumah Layak Huni .....	32
C. Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
D. Definisi Istilah .....	40
E. Desain Penelitian.....	41
F. Data dan Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
I. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
A. Deskripsi Data .....	48
B. Hasil Penelitian .....	50

C. Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Isra'/17:30..... 3



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... 10



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 36



## ABSTRAK

**YESI RUSMAN, 2022.** *“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Agung Zulkarnain.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kategori deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dari buku dan jurnal, internet ataupun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang peneliti lakukan di lapangan, maka penyimpulan bahwa (1). Implementasi program bedah rumah di Desa Bilante Kecamatan Larompong mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun, pada saat pelaksanaannya, program tersebut masih mengalami beberapa hambatan. Dalam aspek organisasi, keterlibatan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program bedah rumah lebih banyak ditangani oleh panitia program bedah rumah yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Pada aspek interpretasi, Dinas Perumahan dan panitia program bedah rumah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bedah rumah. Kinerja panitia program bedah rumah di Desa Bilante cukup baik, namun kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan masih belum optimal. Mereka hanya turun ke lapangan pada saat survei saja dan belum membantu panitia program bedah rumah sepenuhnya dalam pelaksanaan program. Terakhir, pada aspek penerapan, beberapa informan yang ditemui oleh peneliti memiliki pandangan bahwa nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat belum tepat. Nominal yang diberikan kadang-kadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga masih ada beberapa rumah yang sudah dibedah namun kondisinya masih belum memenuhi standar. (2). Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program bedah rumah oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu faktor yang membebani adalah kesulitan dalam menentukan siapa saja masyarakat yang berhak menerima program ini. Faktor lainnya adalah keterbatasan anggaran yang mempengaruhi proses pelaksanaan. Tahapan pencairan anggaran yang lama dan proses pengajuan proposal yang

memakan waktu memperburuk situasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang disediakan dapat dikelola dengan baik dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, Kemiskinan.



## **ABSTRACT**

**Yesi Rusman, 2022.** *"Policy Implementation of the Assistance Program for Livable Simple Housing in Poverty Alleviation (Case Study in Bilante Village, Larompong District, Luwu Regency)". Thesis for the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Palopo, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Agung Zulkarnain.*

*This study aims to describe the implementation of a livable housing assistance program in poverty alleviation in Bilate Village, Larompong District, Luwu Regency. This research is a field research qualitative descriptive category. The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data were obtained from direct interviews with informants, while secondary data sources were obtained from literature reviews from books and journals, the internet or other research related to this research. The data collection techniques used through observation, interviews, and documentation. Based on the results of research and findings that researchers did in the field, it is concluded that (1). The implementation of the house renovation program in Bilate Village, Larompong District, reflects the government's efforts to overcome the problem of poverty. However, during its implementation, the program still encountered several obstacles. In the organizational aspect, the involvement of related parties such as the Department of Housing, Residential Areas and Land Affairs has not been fully involved in program implementation. The implementation of the house renovation program was mostly handled by the house renovation program committee formed at the village or kelurahan level. In the aspect of interpretation, the Housing Agency and the house renovation program committee are responsible for implementing the house renovation program. The performance of the house renovation program committee in Bilate Village was quite good, but the performance of the Housing, Settlement Areas and Land Affairs Offices was still not optimal. They only went into the field during the survey and had not fully assisted the house renovation program committee in implementing the program. Finally, on the implementation aspect, several informants met by the researchers had the view that the amount of assistance given to the community was not appropriate. The amount given is sometimes not enough to rehabilitate the house, so there are still several houses that have been renovated but the conditions are still not up to standard. (2). There are several obstacles in the implementation of the government's home renovation program for people in need. One of the*

*burdensome factors is the difficulty in determining which communities are entitled to receive this program. Another factor is budget constraints that affect the implementation process. The lengthy budget disbursement stages and the time-consuming proposal submission process exacerbated the situation. Therefore, the government must ensure that the budget provided can be managed properly and transparently, so that it can be accounted for.*

**Keywords:** *Implementation, Public Policy, Assistance Program for Livable Simple Housing, Poverty.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Program bantuan rumah yang layak huni merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan hak pemenuhan atas rumah kepada masyarakat miskin/kurang mampu, karena kondisi rumah yang dimiliki oleh mereka seringkali tidak memenuhi kriteria fisik yang layak huni, sehingga pemerintah perlu memperhatikan hal ini untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.<sup>1</sup>

Program Rumah Layak Huni bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan memiliki tanah sendiri atau hibah. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Luwu sebagai pelaksana teknis di tingkat Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pada setiap desa, dibentuk organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di desanya dan

---

<sup>1</sup> Deris Desmawan, et al. *Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021). 16



dibantu oleh BAPEMAS dalam sosialisasi, penyusunan daftar rencana kegiatan, dan pencairan dana bantuan rumah layak huni.<sup>2</sup>

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan dapat menjadi masalah sosial dan ekonomi yang serius karena dapat menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan individu dan masyarakat pada umumnya. Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya berdampak pada orang yang mengalaminya, tetapi juga dapat menyebar ke keluarga, komunitas, bahkan negara secara keseluruhan. Selain itu, kemiskinan juga dapat menyebabkan tingkat kriminalitas dan kekerasan meningkat, serta mengancam stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan menjadi tantangan global yang penting. Berbagai negara telah mengadopsi program dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, seperti program bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, serta investasi dalam kesehatan dan pendidikan. Namun, upaya untuk mengatasi kemiskinan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah kebijakan, kurangnya akses ke sumber daya, dan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang terkait<sup>3</sup>

Beberapa ayat dalam Al-Qura'an membahas tentang kemiskinan salah satunya dalam QS Al-Isra'/17:30,

---

<sup>2</sup>Doni Aprianto Syaputra, et al. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Community Online* 1.2 (2021): 132

<sup>3</sup>Tabita Yudea Kembuan, Jenny Nelly Matheosz, and Maria Heny Pratiknjo. "Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* (2021): 78

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Terjemahnya

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.<sup>4</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya sikap moderat dalam mengelola kekayaan dan memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap mereka yang kurang mampu. Artinya, Allah SWT ingin agar manusia tidak merasa terlalu lemah atau terlalu berkuasa dalam mengelola harta dan kekayaannya. Kekayaan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, dan manusia harus menghargainya dengan cara yang benar. Allah SWT juga mengajarkan bahwa ada orang yang diberikan rezeki lebih dari yang lain, dan ada pula yang diberikan rezeki dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, manusia harus belajar untuk bersikap tawadhu dan tidak merasa superior atau inferior terhadap orang lain yang lebih atau kurang beruntung dalam hal materi. Sebagai muslim, manusia harus berusaha untuk memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap mereka yang kurang mampu, dengan cara memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, QS Al-Isra'/17:30 mengajarkan tentang pentingnya sikap moderat dalam mengelola kekayaan dan memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap mereka yang kurang mampu. Ayat ini juga menegaskan pentingnya menghargai harta yang dimiliki dan mengelolanya dengan bijak, serta berusaha untuk membaginya dengan mereka yang membutuhkan.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya :CV Mahkota, EdisiRevisi, 2019), 108.

<sup>5</sup> Afrizal Nur. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018). 18

Program Rumah Layak Huni merupakan program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak. Program ini juga dilaksanakan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Luwu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Luwu. BAPEMAS bertugas memberi sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni di tingkat kabupaten. Selain itu, di setiap desa dibuat Organisasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di setiap desa. POKMAS dibentuk oleh masyarakat di tingkat desa dengan tujuan untuk mengoordinasikan dan menangani pelaksanaan program di desa mereka. Selain itu, POKMAS juga bertanggung jawab atas pengumpulan data masyarakat penerima bantuan dan melaporkannya kepada BAPEMAS Kabupaten Luwu.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Luwu. Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi BPMD Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Luwu. Keputusan Bupati Luwu Nomor 173 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Luwu. Keputusan ini mengatur tentang prosedur penentuan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Luwu. Dalam pelaksanaannya, Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Luwu harus mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang ada, untuk

memastikan bahwa program ini berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu Kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni di Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Larompong, yang terdiri dari 13 Desa. Setiap tahun, semua Desa di Kecamatan Larompong menerima bantuan untuk membangun rumah layak huni. Penduduk di Kecamatan Larompong mayoritas bekerja sebagai petani dan sebagian besar dari mereka belum memiliki rumah layak huni.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Larompong belum mencapai sasaran yang tepat. Meskipun pada tahun 2021, program tersebut berhasil merealisasikan pembangunan 12 unit rumah layak huni, pada tahun 2022 hanya meningkat menjadi 18 unit. Padahal, jumlah keluarga kurang mampu di Desa Bilante mencapai 75 KK. Salah satu penyebab kurangnya penerima bantuan adalah kuota bantuan yang terbatas dan cara penentuan penerima yang belum tepat. Selain itu, persyaratan penerimaan dalam program bantuan rumah layak huni juga menjadi masalah, karena penerima harus memiliki tanah sendiri untuk pembangunan rumah, padahal masyarakat kurang mampu di sekitar tidak memiliki tanah dan harganya semakin tinggi.

Untuk membangun rumah sederhana layak huni, terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yakni dilengkapi dengan fasilitas MCK. Selain itu, ada pula persyaratan khusus bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan tersebut yaitu,

1. Memiliki E-KTP dan KK
2. Kondisi rumah yang rusak atau tidak layak ditempati
3. Mata pencaharian sebagai petani atau buruh
4. Kepala keluarga dengan cacat fisik dan membuat surat tanah milik pribadi/hibah.

Program bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal memiliki rumah yang layak huni. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menangani angka kemiskinan dan mewujudkan keinginan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni. Oleh karena itu, program bantuan rumah sederhana layak huni sangat penting dan mendesak dalam penanggulangan kemiskinan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)"

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah tentang implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peneliti tidak akan membahas aspek-aspek lain dari penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Desa Bilante, seperti program bantuan lainnya.
2. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana program bantuan rumah sederhana layak huni telah diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah

desa dan apakah tujuan kebijakan telah tercapai.

3. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante dan tidak mencakup desa atau kecamatan lain di Kabupaten Luwu.
4. Penelitian ini hanya akan membahas bagaimana program bantuan rumah sederhana layak huni dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante dan tidak membahas aspek-aspek lain dari pembangunan desa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, perumusan masalah penelitian ini menjadi,

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yakni,

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
2. Untuk mendeskripsikan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan

Larompong Kabupaten Luwu.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Implementasi program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu memiliki beberapa manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan solusi atas masalah kemiskinan dan kurangnya akses terhadap rumah layak huni yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Mengembangkan konsep keadilan sosial dan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi rumah mereka.
- c. Menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi tujuannya dalam hal pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Desa Bilante dengan memberikan mereka rumah yang layak huni.
- b. Membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dengan mengurangi beban pengeluaran mereka untuk memperbaiki rumah mereka.
- c. Menjadi solusi bagi masalah keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, karena rumah yang layak huni akan memberikan perlindungan terhadap cuaca dan faktor lingkungan lainnya.
- e. Meningkatkan tingkat partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap

rumah mereka, yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan perbaikan lingkungan.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menilai sangat penting untuk mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Tujuan dari melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh acuan dan membandingkan hasil, serta untuk mencegah adanya duplikasi dengan penelitian yang sedang dilakukan..

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khusnul Khotimah	Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni yang didanai pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teknik operasional yang ditentukan. Pelaksanaan program ini juga sukses dan masyarakat sudah aktif berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memperbaiki kondisi rumah mereka <sup>1</sup>	Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan	Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain

<sup>1</sup> Khusnul Khotimah. *Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018: 78.

2	Annisa Unafti, dan Rahmat Salam Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kelurahan Parung Serab di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	Indikator komunikasi dalam program bantuan rumah layak huni sudah terbukti efektif dan baik antara Dinas Perumahan, Kantor Pertanahan Pemukiman, BKM/Kelurahan dan masyarakat. Namun, indikator sumber daya masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran. Indikator disposisi juga sudah berjalan dengan baik dengan sikap positif yang ditunjukkan oleh para pelaksana. Struktur birokrasi yang jelas dan sistematis telah memastikan pembagian tanggung jawab yang baik mulai dari Kelurahan, BKM Kelurahan Parung Serab, Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan Dinas Perumahan <sup>1</sup>	Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan	Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain
3	Diah Amelia Hanip Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanganan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan maksimal. Beberapa faktor yang	Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas	Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di

<sup>1</sup> Annisa Unafti, and Rahmat Salam. "Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kelurahan Parung Serab di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* (2022): 111-117.

	<p>Di Desa Sei Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>mempengaruhi implementasi program, seperti sosialisasi yang efektif, tingginya pengetahuan masyarakat, komunikasi yang baik antara TPM, OMS, dan masyarakat, sumber daya berkualitas, sikap baik pelaksana, dan SOP yang jelas dan sistematis, berkontribusi positif pada implementasi program. Namun, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi implementasi, seperti penerima bantuan yang tidak tepat dan pelaksanaan RSLH yang tidak sesuai dengan SOP.<sup>2</sup></p>	<p>topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan</p>	<p>Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain</p>
4	<p>Anisa Ism</p> <p>Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin telah terimplementasi di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dilihat dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima bantuan rumah layak huni. Serta faktor penghambat dan penyelesaian dari implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni</p>	<p>Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan</p>	<p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain</p>

<sup>2</sup> Widodo Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 12

<p>5</p> <p>Haryati Roebyan tho, dan Nunung Unayah.</p> <p>Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang dikarenakan pada umumnya setiap kebijakan terdapat pelaksanaan yang optimal maupun yang tidak optimal.<sup>3</sup></p> <p>Implementasi Program FM-RTLH menunjukkan : (1) belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran, (2) belum jelas kualifikasi pendamping program, tahapan pelaksanaan program belum runtut dan belum semua tahapan dilaksanakan Hal tersebut terjadi disebabkan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program RTLH hanya sampai padataran provinsi. Sedangkan pemahaman pembuat kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan program FM-RTLH kurang karena sosialisasi Pedoman belum ada dalam perencanaan.</p> <p>Implementasi program FM-RTLH di tingkat Kabupaten Garut tidak melalui sosialisasi dari instansi pusat namun sesuai arahan pendamping. Rekomendasi untuk Pemerintah</p>	<p>Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan</p> <p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain</p>
--	---	---

<sup>3</sup> Ismi, Anisa. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 9 (2021): 104.

		pusat, yakni sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat dan tingkat kabupaten (Dinsosnaker, Kimpraswil, PLN, Pertanahan, Pemda). Terbitnya legalitas program di tingkat kabupaten Garut dan Pemerintah provinsi Jawa Barat. <sup>4</sup>			
6	Arif Ginanjar	Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat peningkatan perbaikan rumah dari tahun ke tahun. Selain itu, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. <sup>5</sup>	Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan	Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain
7	Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari	Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan; (1) Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menghasilkan sistem	Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan	Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan

<sup>4</sup>Haryati Roebyantho, and Nunung Unayah. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat." *Sosio Konsepsia* (2019): 311-330.

<sup>5</sup>Ginanjar Arif. "Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang." *Journal of Government and Civil Society* 3.2 (2019): 129-138.

<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu</p>	<p>kebijakan, komunikasi yang baik, Sumber Daya Manusia yang mampu mengakomodir segala aspek, Disposisi masyarakat terhadap program tersebut ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif, dan Struktur Birokrasi yang baik menjamin terselenggaranya seluruh program Desa Sumbergondo; (2) Faktor pendukung Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (3) faktor penghambat Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah kurangnya dana yang diberikan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan.<sup>6</sup></p>	<p>dalam hal penelitian membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah Layak Huni dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan</p>	<p>penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain</p>
<p>8 Mary Ismowati Dan Ahmad Subhan</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial Rumah Tidak</p>	<p>Kedua penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu Program Bantuan Rumah</p>	<p>Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi</p>

<sup>6</sup>Nawi Ahmad, and Asih Widi Lestari. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 7.1 (2019): 89

9	Merry Cintamy Ering, Wilson Bogar, Dan Fitri Mamonto Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon	Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berhasil. <sup>7</sup> Hasil penelitian terhadap implementasi Program ini enunjukkan bahwa (1) Jumlah penerima bantuan sangat minim karena dibatasi dengan alokasi anggaran serta ketidakmampuan arga miskin dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. (2) Pelaksanaan Program belum optimal karena terdapat pembangunan rumah yang belum selesai. Hal itu disebabkan oleh belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak ada tenaga pendamping sosial, dan kurangnya koordinasi <sup>8</sup>	Layak Huni lain dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan	Kedua Sedangkan penelitian, untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Luwu serta peneliti sebelumnya di lokasi lain
10		Hasil dari penelitian ini adalah tersusunnya strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk meliputi 1). Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat bukan	Kedua Sedangkan penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu	Kedua Sedangkan penelitian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal membahas topik yang sama yaitu

<sup>7</sup> Ismowati Mary, and Ahmad Subhan. "Implementasi program pemberdayaan sosial kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di kabupaten Pandeglang." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1.2 (2018): 194-205.

<sup>8</sup> Merry Cintamy Ering, Wilson Bogar, and Fitri Mamonto. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon." *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)* 2.2 (2021).

hanya kepada Program peneliti penerima manfaat saja Bantuan sebelumnya namun juga Rumah di lokasi melakukan sosialisasi Layak Huni lain kepada masyarakat dan yang tidak pengaruhnya mendapatkan RS- terhadap RTLH 2). pengentasan Meningkatkan kemiskinan pengawasan khususnya terhadap proses pengiriman bahan baku bangunan yang dilakukan oleh pihak matrial (Toko Bangunan) kepada penerima manfaat, agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam proses pengiriman.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Implementasi

Menurut teori implementasi kebijakan, suksesnya pencapaian tujuan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas persiapan dan perencanaan implementasi serta kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus dirumuskan dengan baik dan implementasinya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa empat variabel krusial, yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi, beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk memastikan suksesnya implementasi kebijakan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Adhi Purnama Yusuf, et al. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor." *Karimah Tauhid* 1.3 (2022): 289

<sup>10</sup>Dwi Nurani, *Analisis Implementasi*, (Jakarta: FISIP UI, 2019), 77



Menurut George Edward III, implementasi kebijakan publik adalah proses penerapan suatu kebijakan yang telah diterima oleh masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dalam teori implementasi kebijakan publik, implementasi kebijakan dianggap sebagai proses yang kompleks dan memiliki banyak hambatan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Menurut Edward III, ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:<sup>11</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses implementasi.

Menurut George Edward III, komunikasi merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena memegang peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan, komunikasi melibatkan pertukaran informasi antar pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Misalnya, komunikasi yang efektif dapat

---

<sup>11</sup>Widodo Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 16

membantu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan isi dari kebijakan tersebut, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan efektif.

Komunikasi juga dapat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan. Misalnya, pemerintah dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, seperti bagaimana pemerintah akan menyediakan sumberdaya dan bagaimana masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut. Komunikasi juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif dan efisien. Misalnya, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan akan dilakukan dan bagaimana hasil implementasi akan dievaluasi.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, komunikasi memegang peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, komunikasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

#### b. Sumberdaya

Menurut George Edward III, sumberdaya merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Sumberdaya mencakup semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Keberadaan sumberdaya yang memadai sangat penting untuk suksesnya implementasi kebijakan.

---

<sup>12</sup>Widodo Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 18

Sumber daya manusia meliputi orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti pejabat pemerintah, tenaga profesional, dan masyarakat. Keberadaan sumber daya manusia yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Sumber daya keuangan meliputi dana yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Keberadaan sumber daya keuangan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sumber daya teknologi meliputi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Keberadaan sumber daya teknologi yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, sumberdaya memegang peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sumberdaya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

c. Watak atau Sikap

Watak atau sikap merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Watak atau sikap adalah faktor internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti motivasi, minat, dan sikap terhadap kebijakan. Sikap dan watak yang positif sangat penting dalam implementasi kebijakan karena dapat membantu memecahkan hambatan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif.

---

<sup>13</sup> AG. Subarsono. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 63

Motivasi adalah dorongan internal yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam implementasi kebijakan, motivasi yang tinggi dapat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan baik dan memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif. Minat adalah perhatian yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu hal. Dalam implementasi kebijakan, minat yang tinggi terhadap kebijakan dapat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sikap adalah perasaan dan pandangan seseorang terhadap suatu hal. Dalam implementasi kebijakan, sikap yang positif terhadap kebijakan dapat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan baik dan memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif.<sup>14</sup>

Secara keseluruhan, watak atau sikap memegang peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki motivasi, minat, dan sikap yang positif agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

#### d. Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III, struktur organisasi merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi adalah faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti regulasi, prosedur, dan sistem pengendalian. Struktur organisasi yang baik dapat membantu

---

<sup>14</sup> AG. Subarsono. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 65

memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Regulasi adalah peraturan yang membatasi dan mengatur implementasi kebijakan. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan. Prosedur yang jelas dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem pengendalian adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan implementasi kebijakan. Sistem pengendalian yang baik dapat membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, struktur organisasi memegang peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Menurut Edward III, empat variabel krusial tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk memastikan suksesnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Widodo Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 19

<sup>16</sup> AG. Subarsono. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 67

Sedangkan metode evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones terdiri dari tiga tahapan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Berikut ini adalah penjelasan setiap tahapannya:

a. Tahap Organisasi

Tahap ini melibatkan pengidentifikasian dan pengklasifikasi aktivitas yang terkait dengan implementasi program atau proyek. Dalam tahap ini, aktivitas-aktivitas diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan.

b. Tahap Interpretasi

Tahap ini melibatkan pemahaman dan interpretasi aktivitas yang terkait dengan implementasi. Dalam tahap ini, evaluator memperoleh informasi mengenai bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan dan apakah mereka mencapai tujuannya. Evaluator juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap standar, kualitas pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan.

c. Tahap Penerapan

Tahap ini melibatkan penggunaan informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya untuk mengevaluasi implementasi secara keseluruhan. Dalam tahap ini, evaluator menggunakan informasi yang diperoleh untuk menentukan apakah implementasi berhasil atau tidak, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Evaluator juga menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memperbaiki implementasi di masa depan.

Dengan demikian, metode evaluasi implementasi Charles O'Jones membantu evaluator untuk memahami dan mengevaluasi implementasi program

atau proyek secara komprehensif, memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat, dan membuat tindak lanjut yang sesuai untuk memperbaiki implementasi di masa depan.<sup>17</sup>

## 2. Kebijakan Publik

Dalam buku "Analisis Kebijakan Publik" karya Subarsono, kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik melibatkan serangkaian proses, mulai dari identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, implementasi, dan evaluasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan dapat mengatasi masalah secara efektif dan efisien.

Menurut Subarsono, kebijakan publik harus memperhitungkan berbagai faktor, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan publik harus didukung oleh analisis yang cermat dan obyektif, serta memperhitungkan berbagai alternatif solusi yang ada. Subarsono menekankan pentingnya analisis kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan dapat mengatasi masalah secara efektif dan efisien. Analisis kebijakan publik membantu pemerintah untuk memahami berbagai alternatif solusi yang ada, memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan,

---

<sup>17</sup> AG. Subarsono. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 70

dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memenuhi standar kualitas dan efektivitas.<sup>18</sup>

Kebijakan adalah dasar dari suatu tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kebijakan harus diterapkan terlebih dahulu sebelum adanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya dapat muncul setelah suatu kebijakan disepakati oleh personal atau individu pejabat yang berwenang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah dasar dari kebijaksanaan.

Menurut Thomas R. Dye dalam Harbani, kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Dye, kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan media, dan melibatkan berbagai tahap, seperti identifikasi masalah, pembentukan solusi, implementasi, dan evaluasi.

Menurut Dye, kebijakan publik bukan hanya tentang pembuatan aturan atau regulasi, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan bagaimana hasil implementasi tersebut dievaluasi. Oleh karena itu, implementasi dan evaluasi kebijakan publik sama pentingnya dengan pembuatan kebijakan itu sendiri. Dye juga menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya tentang masalah teknis, tetapi juga mencakup masalah-masalah politik dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memperhitungkan berbagai faktor, seperti

---

<sup>18</sup>Joko Widodo. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 12



pandangan masyarakat, kepentingan pemangku kepentingan, dan dampak sosial dan lingkungan.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan, pandangan Dye menekankan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dan faktor. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan masalah dalam masyarakat dapat terpecahkan.<sup>20</sup>

Menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh Winarno, kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diprediksi. Dalam pandangan Pressman dan Wildavsky, kebijakan publik bukan hanya tentang pembuatan aturan atau regulasi, tetapi juga tentang bagaimana kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang terkait dengan kebijakan tersebut dapat diprediksi dan diamati. Oleh karena itu,

---

<sup>19</sup>Harbani Pasolong. *Teori Administra Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 39

<sup>20</sup>Solichin Abdul Wahab. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. (Jakarta:Bumi Aksara, 2021). 17

kebijakan publik harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.<sup>21</sup>

Menurut pandangan Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk-bentuk kebijakan lain seperti kebijakan swasta, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari pemerintah. Meskipun banyak pihak beranggapan bahwa konsep kebijakan publik terlalu luas untuk dipahami, namun dalam kenyataannya, kebijakan publik dapat mencakup berbagai hal dan melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai ciri-ciri Kebijakan Publik:

- a. Kebijakan publik dikenal sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dan memiliki tujuan tertentu. Misalnya, dengan hadirnya unit-unit perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah, pemerintah dapat mengarahkan tindakan-tindakannya ke arah tujuan yang spesifik.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah dan memiliki tujuan tertentu. Kebijakan bukan hanya terbatas pada pembuatan undang-undang dalam bidang tertentu, tetapi juga harus diikuti dengan prosedur pelaksanaan yang lebih detail.
- c. Kebijakan publik mengacu pada apa yang nyatanya dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>21</sup>Budi Winarno. *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pt. Buku Kita, 2019). 10

<sup>22</sup>Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 7

dalam bidang tertentu. Contohnya, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

- d. Kebijakan publik bisa berbentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penyelesaian masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik terdiri dari keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak dalam masalah dimana campurtangan pemerintah sebenarnya sangat diperlukan.
- e. Dengan demikian, ciri-ciri kebijakan publik adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah, memiliki tujuan tertentu, terdiri atas serangkaian tindakan yang saling berkaitan, mengacu pada apa yang nyatanya dilakukan oleh pemerintah, dan bisa berbentuk positif atau negatif.<sup>23</sup>

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting dan harus dicarikan solusinya, terutama dalam konteks masyarakat negara-negara berkembang. Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah sosial yang harus ditangani, tetapi juga merupakan halangan bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pemecahan kemiskinan harus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pembangunan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Solichin Abdul Wahab. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 22

<sup>24</sup>Wildana Wargadinata. *Islam dan pengentasan kemiskinan*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2019). 38.

Saat ini, terdapat beberapa definisi dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu individu atau kelompok. Hal ini mengakibatkan perbedaan strategi dalam penanggulangan kemiskinan, karena setiap definisi dan kriteria memiliki pendekatan dan solusi yang berbeda.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai situasi atau kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan hidup mereka sampai suatu tingkat yang dianggap manusiawi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan kondisi dan situasi setiap individu atau kelompok yang terkena dampak kemiskinan.<sup>25</sup>

Kemiskinan adalah kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh individu atau masyarakat yang mengalaminya, dan biasanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah, pendapatan yang rendah, kesehatan dan gizi yang buruk, dan kesejahteraan yang buruk, yang pada gilirannya menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sumber daya manusia yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah. Terdapat tiga definisi dari kemiskinan, yaitu kemiskinan relative, kemiskinan absolute, dan kemiskinan structural dan cultural.

- a. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lain dalam masyarakat yang sama. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan relatif seseorang atau kelompok ditentukan oleh posisinya dalam skala sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kemiskinan relatif biasanya diukur

---

<sup>25</sup>Devi Arfiani. *Berantas Kemiskinan*. (Jakarta: Alprin, 2020). 19

dengan membandingkan tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan kualitas hidup lainnya dari satu kelompok dengan kelompok lain.

- b. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat sedikit dan tidak memenuhi standar minimum hidup yang diterima oleh masyarakat. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan absolut seseorang atau kelompok tidak tergantung pada posisi mereka dalam masyarakat, melainkan pada tingkat pendapatan atau sumber daya yang mereka miliki. Kemiskinan absolut biasanya diukur dengan menentukan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. Kemiskinan struktural adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya yang sedikit karena adanya kebijakan atau sistem yang tidak adil. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan seseorang atau kelompok tidak sepenuhnya tergantung pada usaha mereka sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti diskriminasi, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang tidak adil.
- d. Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses terhadap sumber daya yang sedikit karena diskriminasi atau stigma yang berbasis budaya. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan seseorang atau kelompok dipengaruhi oleh budaya dan norma masyarakat yang memandang mereka sebagai rendah atau tidak berharga. Kemiskinan kultural

biasanya diukur dengan menentukan tingkat diskriminasi dan stigma yang dialami oleh kelompok tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan layanan yang tersedia. Kemiskinan kultural seringkali terkait dengan masalah seperti diskriminasi gender, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap masyarakat LGBTQ+, dan diskriminasi terhadap masyarakat asli. Hal ini membuat kelompok tersebut lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>26</sup>

Dalam analisis kebijakan publik, penting untuk memahami dan memperhitungkan berbagai jenis kemiskinan yang ada, termasuk kemiskinan relatif, absolut, struktural, dan kultural. Ini membantu pemerintah dan masyarakat untuk menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk hidup dengan sejahtera.

Menurut Ali Khomsan, *et.al*, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana sejumlah atau golongan orang memiliki tingkat hidup yang sangat rendah dan terdapat kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi tingkat kesehatan, moral, dan harga diri dari orang-orang yang tergolong sebagai miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar hidup yang rendah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup orang-orang yang tergolong sebagai miskin. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi masalah

---

<sup>26</sup> Bhinadi Ardito. *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 23

kemiskinan agar orang-orang yang tergolong sebagai miskin dapat hidup dengan lebih baik dan memiliki hidup yang lebih layak.<sup>27</sup>

#### **4. Program Bantuan Rumah Layak Huni**

##### **a. Pengertian Program Bantuan Rumah Layak Huni**

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Fungsinya sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga sangatlah penting bagi setiap warga masyarakat. Namun, pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Padahal, setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sayangnya, dalam kenyataan, banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat.<sup>28</sup>

Program rumah layak huni adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah atau organisasi sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah layak huni. Tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program rumah layak huni dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperbaiki rumah yang tidak layak huni, membangun rumah baru bagi keluarga yang belum memiliki tempat tinggal, atau memberikan bantuan finansial bagi keluarga yang

---

<sup>27</sup>Ali Khomsan, et al. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019). 73

<sup>28</sup>Tri Sugihartono. "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web." *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)* 7.1 (2018): 52-56.

ingin membeli rumah. Program rumah layak huni dapat diterapkan pada skala lokal maupun nasional, dan dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam implementasi program ini, perlu dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan.<sup>29</sup>

Secara keseluruhan, program rumah layak huni merupakan salah satu upaya yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program ini harus didukung dan diterapkan secara bersama-sama oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuannya.

#### b. Tujuan Program Bantuan Rumah Layak Huni

Tujuan dari program bantuan rumah layak huni adalah untuk membantu memperbaiki kondisi rumah bagi keluarga yang tidak mampu memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Tujuan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup penduduk. Beberapa tujuan spesifik dari program bantuan rumah layak huni dapat meliputi:

- 1) Memberikan akses bagi keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak untuk ditinggali, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka.
- 2) Meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan, karena rumah yang layak memiliki fasilitas yang memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.
- 3) Meningkatkan ekonomi dan produktivitas masyarakat, karena rumah yang layak memungkinkan mereka untuk bekerja dan berproduktivitas dengan lebih

---

<sup>29</sup>Hiya Nalatissifa, and Yudi Ramdhani. "Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 19.2 (2020): 246-256.



baik.

- 4) Menurunkan tingkat kemiskinan, karena rumah yang layak memungkinkan mereka untuk menghemat uang mereka dan memperbaiki kondisi hidup mereka.
- 5) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, karena rumah yang layak memiliki fasilitas yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, tujuan dari program bantuan rumah layak huni adalah untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk dan mengatasi masalah kemiskinan

#### c. Mekanisme Peyaluran Bantuan Rumah Layak Huni

Mekanisme peyaluran bantuan rumah layak huni adalah proses bagaimana bantuan tersebut disalurkan kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Berikut ini adalah beberapa langkah spesifik dalam mekanisme peyaluran bantuan rumah layak huni:

##### 1) Survei dan identifikasi

Survei dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Survei ini melibatkan pemerintah setempat, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menentukan kebutuhan dan kondisi rumah yang tidak layak huni.

---

<sup>30</sup>Alif Sofian, et al. "Analisis Penyaluran Program RTLH dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang." *Jurnal Rekonisasi Ekonomi Islam* 1.1 (2022): 60-66.

## 2) Verifikasi dan seleksi penerima manfaat

Setelah survei dilakukan, data dari keluarga yang membutuhkan bantuan akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa keluarga tersebut memenuhi kriteria penerima manfaat.

## 3) Penyaluran bantuan

Bantuan rumah layak huni akan diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria dan terverifikasi. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan material, uang, atau bantuan teknis.

## 4) Monitoring dan evaluasi

Setelah bantuan diterima, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan membantu memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.<sup>31</sup>

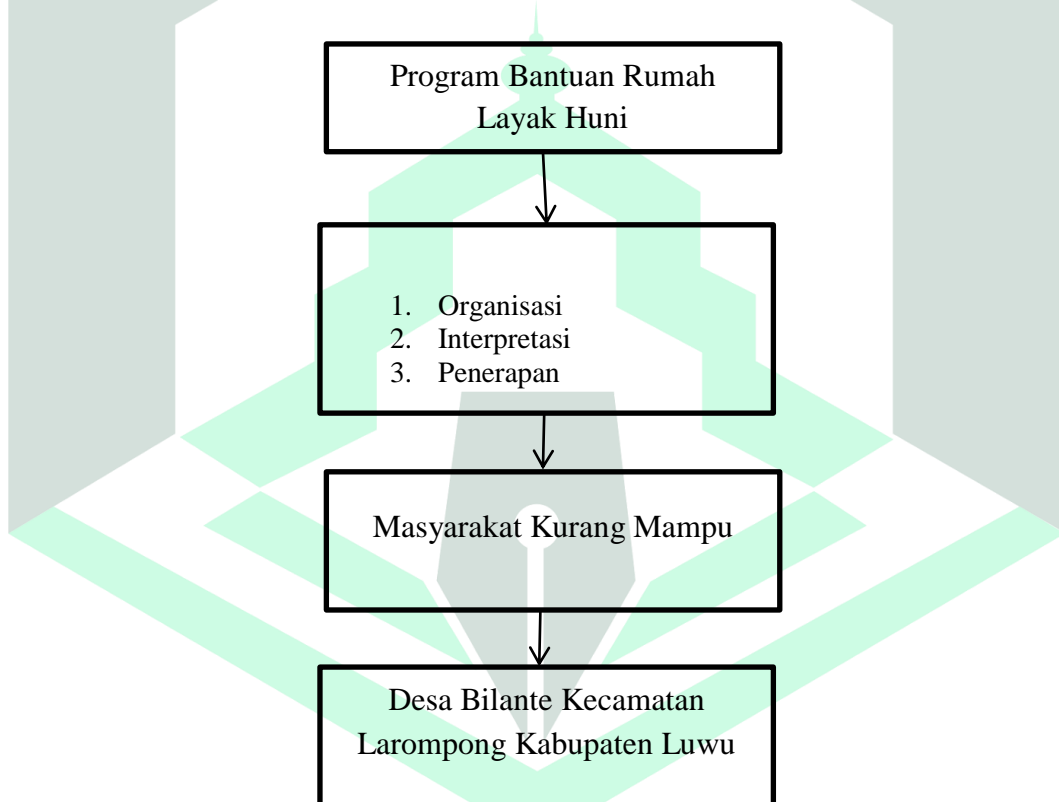
Secara keseluruhan, mekanisme peyaluran bantuan rumah layak huni harus transparan, akuntabel, dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Dengan demikian, bantuan rumah layak huni dapat membantu memperbaiki kualitas hidup penduduk dan mengatasi masalah kemiskinan.

---

<sup>31</sup>Alif Sofian, et al. "Analisis Penyaluran Program RTLH dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang." *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 1.1 (2022): 60-66.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu representasi visual atau sistematis dari suatu konsep, konsep dasar, atau hipotesis yang digunakan untuk memahami suatu masalah atau isu tertentu. Kerangka pikir dapat berupa diagram, bagan, atau representasi visual lainnya yang menunjukkan hubungan antara konsep atau variabel dan menyediakan struktur untuk memahami masalah atau isu. Kerangka pikir dapat membantu memperjelas masalah, memprioritaskan faktor-faktor yang berpengaruh, dan membantu menentukan arah yang lebih baik untuk mengatasi masalah. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa secara garis besar kerangka pemikiran penulisan ini berkaitan dengan implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan

Larompong, Kabupaten Luwu. Untuk mengukur implementasi program bantuan rumah layak huni, peneliti menggunakan teori evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones terdiri dari tiga tahapan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Kabupaten Luwu sebagai instansi pemerintah yang bertugas melayani dan membantu program bantuan rumah layak huni untuk warga di Kecamatan Larompong, diharapkan dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh warga untuk memiliki rumah yang layak untuk ditinggali bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Binte Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Dengan memperhatikan kerangka pikir ini, peneliti dapat memahami dan mengukur implementasi program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan membantu memperbaiki program tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi warga yang membutuhkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu studi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, dengan fokus pada pengalaman dan persepsi subjek penelitian.<sup>1</sup> Dalam hal ini, subjek penelitian adalah implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan program tersebut secara detil dan mendalam, melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan pemahaman secara kontekstual dari suatu situasi alamiah. Dalam hal ini, berbagai metode ilmiah akan digunakan untuk memahami implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan diri pada intisari permasalahan yang sedang terjadi dan harus dilakukan dengan cara yang sangat jelas dan terperinci. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan peneliti selanjutnya sebelum

---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018). 21.

melakukan pengamatan atau observasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan program bantuan rumah layak huni diterapkan dan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Bilante. Penelitian ini juga akan membahas apa saja hambatan yang dialami dalam proses implementasi kebijakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan.

Dengan memfokuskan pada intisari permasalahan dan implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena selain alasan domisili di lokasi tersebut, juga karena untuk menghemat waktu dan biaya. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang dikaji, peneliti memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian. Dengan memperhitungkan hal tersebut, peneliti menentukan waktu penelitian yang akan dilakukan selama bulan Januari hingga Februari 2023.

## D. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dengan penjelasan yang lebih rinci dan jelas:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Implementasi mencakup berbagai aktivitas, dari perencanaan hingga pelaksanaan, yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur implementasi program bantuan rumah layak huni, peneliti menggunakan teori evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones terdiri dari tiga tahapan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan

### 2. Kebijakan Program

Kebijakan program adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah publik dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kebijakan program dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sosial, atau kebijakan lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

### 3. Program Rumah Layak Huni

Program Rumah Layak Huni adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki hunian yang layak dan sehat. Program ini diluncurkan untuk mengatasi masalah kekurangan dan kualitas hunian yang buruk di Indonesia.

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi saat seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat akses terhadap pelayanan publik. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan perhatian dan tindakan yang cepat dan efektif dari pemerintah dan masyarakat.

#### **E. Desain Penelitian**

Desain penelitian untuk mengevaluasi implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu melibatkan beberapa tahapan penting, seperti:

##### 1. Penetapan Masalah

Penetapan masalah melibatkan pengidentifikasian masalah utama dan tujuan dari penelitian. Dalam hal ini, masalah utama adalah implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante.

##### 2. Penetapan Studi Literatur

Studi literatur melibatkan pemeriksaan sumber-sumber terkait dengan masalah utama, seperti buku-buku, jurnal, dan laporan yang membahas mengenai implementasi kebijakan publik, program bantuan rumah layak huni, dan penanggulangan kemiskinan.



### 3. Penetapan Metode Penelitian

Metode penelitian melibatkan pemilihan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam hal ini, metode yang mungkin digunakan meliputi survei, wawancara, dan observasi.

### 4. Penetapan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian melibatkan pembuatan kuesioner, daftar pertanyaan untuk wawancara, atau form observasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi.

### 5. Analisis data

Analisis data melibatkan pengolahan dan interpretasi data dan informasi yang dikumpulkan melalui metode penelitian yang dipilih.

### 6. Interpretasi dan simpulan

Interpretasi dan simpulan melibatkan pemahaman dan penafsiran hasil analisis data dan pembuatan simpulan dan rekomendasi yang relevan.

Secara keseluruhan, desain penelitian mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu harus memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan valid, representatif, dan memenuhi tujuan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat membantu memahami implementasi kebijakan dan membantu mengatasi masalah kemiskinan di Desa Bilante.

## **F. Data dan Sumber Data**

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan

untuk melakukan penelitian dan memahami implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan survei.<sup>2</sup> Data primer ini bersifat langsung dan sangat spesifik terkait dengan masalah yang diteliti, seperti informasi tentang kondisi rumah yang tidak layak huni, kebutuhan masyarakat akan bantuan rumah layak huni, dan percepatan implementasi kebijakan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Aparat Desa dan Penerima rumah bantuan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder, seperti laporan pemerintah, laporan dari lembaga swadaya masyarakat, dan dokumen-dokumen publik lainnya.<sup>3</sup> Data sekunder ini bersifat tidak langsung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti informasi tentang program bantuan rumah layak huni yang telah diimplementasikan sebelumnya dan hasilnya.

Kedua jenis data tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa

---

<sup>2</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 123.

<sup>3</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 124

Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Data primer dan sekunder ini sangat penting untuk menentukan efektivitas dan efisiensi program bantuan rumah layak huni dalam mengatasi masalah kemiskinan.

### **G. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara adalah dua teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedua teknik tersebut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan indera untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diamati.<sup>4</sup> Dalam hal ini, observasi dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni. Observasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap program bantuan rumah layak huni, seperti melihat kondisi rumah yang dibantu dan melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi program bantuan rumah layak huni.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai subyek yang

---

<sup>4</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 102

ditanyai.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, wawancara dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dari pihak-pihak yang terkait, seperti pejabat pemerintah, masyarakat, dan penerima bantuan. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara terstruktur dan sistematis kepada pihak-pihak yang terkait.

Kedua teknik pengumpulan data ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Pengumpulan data yang komprehensif dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi program bantuan rumah layak huni dan mengatasi masalah kemiskinan.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, berikut ini beberapa teknik pemeriksaan yang dapat digunakan

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi melibatkan penggunaan beberapa sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan

---

<sup>5</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 105

bahwa data yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode. Triangulasi metode adalah penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, peneliti dapat menggunakan wawancara, angket, dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

## 2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan data yang diambil dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah stabil dan konsisten. Dengan melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian yang didapatkan juga lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

### I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, teknik analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>6</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Cet. Ke-25, (Jakarta: Alfabeta), 245-253

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mempersempit jumlah data yang dikumpulkan dengan memfokuskan pada informasi yang relevan dan penting bagi penelitian. Dalam hal ini, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dihapus atau disederhanakan untuk mempermudah analisis.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mempresentasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mempermudah analisis. Data dapat diolah dan dipresentasikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah visualisasi dan memperjelas hubungan antar variabel.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menggunakan analisis data dan interpretasi untuk mencapai kesimpulan yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian.<sup>7</sup> Dalam hal ini, analisis data dan interpretasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan program bantuan rumah layak huni mempengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Secara keseluruhan, teknik analisis data membantu mempermudah analisis dan interpretasi data dan membantu mencapai kesimpulan yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, teknik analisis data sangat penting dalam penelitian dan membantu memperjelas hasil dan kesimpulan penelitian.

---

<sup>7</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 255

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bilante merupakan sebuah wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki luas sebesar 5.270 hektar dan terdapat 2159 jiwa penduduk. Desa Bilante dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Warnida Masdir yang bertugas memimpin dan mengendalikan roda-roda pemerintahan di desa.

Desa Bilante memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut terdapat dalam sektor agribisnis, yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Dalam sektor pertanian, masyarakat Desa Bilante memiliki kegiatan usaha seperti pertanian padi dan jagung. Di sektor perkebunan, terdapat usaha perkebunan cengkeh dan merica. Di sektor peternakan, masyarakat memiliki kegiatan peternakan ayam, dan di sektor perdagangan, terdapat usaha perdagangan eceran dan grosir.

Namun, dalam hal ini, masyarakat Desa Bilante lebih dominan berprofesi sebagai petani padi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian padi memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat Desa Bilante. Oleh karena itu, potensi yang ada di desa ini harus dikembangkan dan diterapkan secara optimal agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan memperkuat perekonomian desa.

## 2. Karakteristik Informan

Karakteristik informan adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data untuk keperluan penelitian atau pengumpulan data. Karakteristik informan dapat berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, bahasa, latar belakang budaya, dan sebagainya. Karakteristik informan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian atau pengumpulan data karena dapat mempengaruhi cara informan memberikan informasi atau data, dan juga dapat mempengaruhi interpretasi hasil penelitian atau pengumpulan data. Berikut karakteristik informan penelitian ini,

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Sofyan Thamrin	Laki-laki	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu
2	Endang	Perempuan	Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu
3	Ayyub Bakar	Laki-laki	Kasi Kesra Desa Bilante Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni
4	Miftahul Ma'wa	Perempuan	
5	Andi Baso	Laki-laki	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Lismayana	Perempuan	Penerima Bantuan Program
7	Ismail	Laki-laki	
8	Nirwana	Perempuan	
9	Hartina	Perempuan	

*Sumber: data diolah, 2023*



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.**

Untuk memahami dan mengevaluasi implementasi program bantuan rumah layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, peneliti memfokuskan penelitiannya pada hal tersebut. Peneliti memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ada. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Setiap tahapan memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam mengevaluasi implementasi program:

#### **a. Organisasi**

Tahap organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan implementasi program sudah terorganisasi dengan baik. Tahap interpretasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memfokuskan pada memahami dan mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk kualitas pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. Setiap program yang dijalankan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, pasti memerlukan seseorang atau suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola jalannya program tersebut. Hal ini membutuhkan struktur organisasi yang dibentuk sebagai pendukung kelancaran program.

Dalam hal pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni, struktur pelaksanaan program sangat penting agar program dapat berjalan lancar

dan tepat sasaran. Menurut Sofyan Thamrin, kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Luwu

*“Keterlibatan dalam program bantuan rumah sederhana layak huni ini mencakup struktur yang melibatkan Dinas Perumahan, Badan Keuangan Daerah, kelurahan atau desa, serta panitia program bantuan rumah sederhana layak huni yang telah dibentuk di setiap desa”*.<sup>1</sup>

Endang, Kepala Seksi Perumahan, mengungkapkan bahwa pada program bantuan rumah sederhana layak huni di Kabupaten Luwu, terdapat Dinas Perumahan, panitia program bantuan rumah sederhana layak huni, dan BKD.

*“Pada program bantuan rumah sederhana layak huni di Kabupaten Luwu ini ada Dinas Perumahan, panitia program bantuan rumah sederhana layak huni dan BKD”*.<sup>2</sup>

Sebagai pelaksana program bantuan rumah sederhana layak huni, Dinas Perumahan memiliki tugas utama melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, menerima dan memverifikasi proposal, melakukan survei lapangan bersama tim teknis dan lokal, hingga menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Tim verifikasi akan dibantu oleh tim desa/kelurahan untuk mempermudah proses survei, dan setelah itu akan dilakukan pembukaan rekening, pemanggilan panitia, penandatanganan pakta integritas, berita acara penyerahan uang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Setelah semua tahap administrasi selesai, barulah proses selanjutnya adalah pembangunan rumah sederhana layak huni yang akan dibantu oleh Dinas Perumahan. Tim teknis akan melakukan pengawasan dan supervisi terhadap

---

<sup>1</sup>Sofyan Thamrin, kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>2</sup>Endang, Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

proses pembangunan rumah sederhana layak huni untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, Dinas Perumahan juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya, dan memenuhi harapan masyarakat.

Dengan demikian, Dinas Perumahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni. Melalui tahap-tahap yang dilakukan, Dinas Perumahan berupaya untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan memenuhi harapan mereka akan rumah sederhana layak huni.

Endang, sebagai Kepala Seksi Perumahan, juga menyatakan hal yang serupa mengenai kewajiban Dinas Perumahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni.

*“Dalam proses bantuan rumah sederhana layak huni, Dinas Perumahan memegang peran penting sebagai tim verifikasi. Proses dimulai dengan penerimaan proposal dan verifikasi yang membutuhkan dokumen pendukung seperti surat permohonan dari desa/kelurahan, KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, surat keputusan bedah rumah, RAB, foto fisik rumah, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen lain. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi syarat dan kriteria. Setelah validasi, tim verifikasi akan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi rumah. Kemudian, pengadministrasian pencairan dana dilakukan, termasuk pembukaan rekening, pemanggilan panitia, penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan tanggung*

*jawab. Pencairan dana sendiri dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah melalui Bank”.*<sup>3</sup>

Menurut Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, tugas Bank hanyalah sebagai pihak pelaksana yang bertanggung jawab untuk membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan. Selain itu, tugas Kepala Desa Bilante adalah membantu Dinas Perumahan dalam proses pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni. Tugas ini meliputi pengumpulan data mengenai rumah-rumah yang tidak layak huni, serta mengawasi proses pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni mulai dari awal hingga akhir.

*“Untuk pemerintah Desa Bilante, tugasnya adalah untuk terlibat dalam perencanaan rumah yang akan dibongkar, mencatat rumah yang tidak layak huni dari setiap dusun, dan membantu menkoordinasikan antara panitia program bantuan rumah layak huni yang ada di desa dengan pemerintah.”*<sup>4</sup>

Panitia program bantuan rumah sederhana layak huni yang ada di setiap desa atau kelurahan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tim pelaksana dari program bantuan rumah sederhana layak huni adalah panitia ini. Tugas panitia adalah sebagai pelaksana teknis, yang meliputi pembuatan proposal untuk pengajuan program bantuan rumah sederhana layak huni, pengadaan barang untuk rumah yang ingin diperbaiki, serta membantu proses pembangunan rumah tersebut. Selain itu, panitia juga bertanggung jawab dalam membuat laporan pertanggungjawaban terkait rumah yang telah diperbaiki.

---

<sup>3</sup>Endang, Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>4</sup>Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

Miftahul Ma'wa, bendahara panitia program bantuan rumah sederhana layak huni, menyatakan sebagai berikut.:

*“Panitia memegang peran utama dalam program bantuan rumah sederhana layak huni, mulai dari pembuatan proposal, pencairan dana, proses pembangunan, dan pembuatan laporan akhir (LPJ). Sementara Dinas Perumahan hanya bertugas melakukan survei lapangan, dan Desa hanya bertugas melakukan pendaftaran data saja.”<sup>5</sup>*

Hal yang sama disampaikan oleh penerima bantuan program bantuan rumah sederhana layak huni yaitu Ibu Lismaya yang mengatakan:

*“Menurut informasi yang saya miliki, semua yang terkait dengan pengurusan panitia ditangani oleh mereka. Mulai dari memenuhi persyaratan hingga melakukan pembongkaran rumah ini. Pemerintah pernah melakukan survei di sini, namun aparat desa belum pernah melakukan pemeriksaan di sini.”<sup>6</sup>*

Jumlah pelaksana program bantuan rumah sederhana layak huni dilihat dari seberapa banyak pihak yang terlibat dalam program tersebut. Pihak yang terlibat dalam program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong ialah panitia program bantuan rumah sederhana layak huni yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Seperti yang diungkapkan oleh Ayyub Bakar sebagai Kasi Kesra Desa Bilante yang mengatakan:

*“Dalam program bantuan rumah sederhana layak huni, setiap dusun memiliki panitia sendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Panitia ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan rumah dari awal hingga selesai.”<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>6</sup> Lismayana, Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>7</sup>Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

Hal ini senada yang disampaikan oleh Miftahul Ma'wa sebagai bendahara panitia program bantuan rumah sederhana layak huni yang mengatakan:

*“Hanya ketua, sekretaris, dan bendahara dari panitia yang melakukan pelaksanaan. Ada juga bantuan dari masyarakat yang terkadang membantu dalam proses pembangunan rumah. Masyarakat masih memiliki semangat gotong royong untuk membantu.”<sup>8</sup>*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Kesra Desa Bilante yaitu Ayyub Bakar yang mengatakan:

*“Pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni yang dianggarkan oleh pemerintah kepada Desa Bilante terlihat cukup baik. Panitia bekerja dengan sangat efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi program sebanyak 18 rumah pada tahun 2022, sesuai dengan jumlah yang dianggarkan”.<sup>9</sup>*

#### b. Interpretasi

Dalam metode evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones, tahap interpretasi bertujuan untuk memantau pelaksanaan program rumah layak huni dan memahami bagaimana program tersebut berjalan. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Sofyan Thamrin, memberikan penjelasan tentang tanggung jawab yang terkait dengan program bantuan rumah sederhana layak huni. Proses interpretasi melibatkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam program dan memastikan bahwa mereka memahami peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari tahap interpretasi ini adalah untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>8</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>9</sup> yyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

*"Dulu program bantuan rumah sederhana layak huni ditangani oleh Pada tahun 2017, tanggung jawab program bantuan rumah sederhana layak huni beralih dari Kesra ke Dinas Perumahan. Walaupun demikian, tugas utama dalam pelaksanaan program ini masih ditangani oleh panitia program bantuan rumah sederhana layak huni yang dibentuk di setiap desa atau kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Sementara itu, Dinas Perumahan hanya bertindak sebagai pejabat teknis yang bertugas melakukan monitoring lapangan. Tugas lapangan sendiri dilakukan oleh Kepala Seksi Perumahan."<sup>10</sup>*

Endang, Kepala Seksi Perumahan Kecamatan Larompong, menjelaskan bahwa

*"Panitia program bantuan rumah sederhana layak huni merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Sebelumnya, program ini dikelola oleh Kesra, namun kini diserahkan kepada BKD. Karena BKD bukanlah pihak yang memiliki keahlian teknis, maka program ini diserahkan kepada Dinas Perumahan untuk melaksanakan tugasnya. Tugas Dinas Perumahan adalah memilih proposal yang layak, melakukan survei di desa, dan menentukan anggaran untuk masyarakat."<sup>11</sup>*

Peneliti berusaha untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam implementasi program rumah layak huni di Desa Bilante, Kecamatan Larompong. Melalui wawancara dengan Ayyub Bakar sebagai Kasi Kesra Desa Bilante, diketahui bahwa panitia adalah pihak yang bertanggung jawab. Sementara Kasi Kesra Desa Bilante hanya memainkan peran sebagai pengawas, membantu memantau dan mencatat rumah yang tidak layak huni.<sup>12</sup>

Miftahul Ma'wa, sebagai Bendahara panitia program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante, mengatakan bahwa

---

<sup>10</sup>Sofyan Thamrin, kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>11</sup>Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>12</sup>Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

*“panitia bertanggung jawab langsung kepada Dinas Perumahan atau pemerintah untuk mengawasi proses pembangunan rumah hingga selesai dibangun dan melaporkan pertanggungjawaban.”<sup>13</sup>*

Peneliti juga mengumpulkan informasi tentang kinerja pelaksana program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante melalui wawancara dengan Ibu Sani, salah satu penerima bantuan program. Bapak Ismail menyatakan bahwa

*“panitia yang menjalankan program tersebut cukup baik dan membantu dalam mengurus rumah tersebut dari awal hingga selesai. Ia menambahkan bahwa dinas perumahan hanya melakukan survei saat rumah sudah selesai dibangun.”<sup>14</sup>*

Evaluasi kinerja dalam program bantuan rumah sederhana layak huni tidak hanya melibatkan Desa dan panitia program saja, tetapi juga Dinas Perumahan harus diperhitungkan. Informan seperti Miftahul Ma'wa, sebagai bendahara panitia program, juga memberikan pandangannya terhadap kinerja Dinas Perumahan:

*“Menurut pandangan saya, Dinas Perumahan sudah memiliki kinerja dan program yang baik. Ini dapat dilihat dari proses verifikasi yang dilakukan sebelum pengajuan dan pemberian bantuan program rumah layak huni”.<sup>15</sup>*

Walaupun demikian, opini yang diberikan oleh penerima bantuan program rumah sederhana layak huni, Ibu Nirwana, berbeda. Ia mengatakan bahwa

*“pelaksanaannya cukup baik, namun terkadang Dinas Perumahan hanya muncul saat survei rumah saja dan tidak ada saat proses pembangunan.”*

---

<sup>13</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>14</sup>Sani, Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>15</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023



*Hanya ada panitia dan masyarakat setempat yang membantu proses pembangunan.”<sup>16</sup>*

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Ibu Sani, seorang penerima bantuan program rumah layak huni, dapat diketahui bahwa esensi dari program tersebut adalah untuk menumbuhkan kembali rasa gotong royong dan kesetiakawanan sosial yang sempat pudar dalam masyarakat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

*“Kemiskinan di sini sedikit teratasi berkat bantuan yang diterima dari pemerintah dan kerjasama yang baik dari masyarakat, termasuk tukang yang bekerja keras. Alhamdulillah, kita bersyukur atas bantuan ini dan sangat terasa membantu.”<sup>17</sup>*

Menurut Miftahul Ma'wa, bendahara panitia program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante, proses bedah rumah dilakukan dengan memanfaatkan tenaga tukang. Selain itu, spirit gotong royong masih kuat di Desa Bilante, sehingga membantu dalam proses perehaban rumah. Namun, masalah yang dihadapi adalah anggaran yang tidak cukup untuk membayar gaji tukang.<sup>18</sup>

### c. Penerapan

Perencanaan dan penerapan merupakan dua tahap penting dalam implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni. Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan program untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan program. Dalam pengajuan awal, masyarakat diminta untuk

---

<sup>16</sup> Nirwana, Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>17</sup>Ismail, Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>18</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Setelah lolos proposal, tim verifikasi akan melakukan survei langsung rumah yang ingin dibantu. Jika sudah sesuai dan memenuhi syarat, maka akan keluar SK dari pemerintah sebagai penerima program bantuan rumah sederhana layak huni. Menurut Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, Endang, persyaratan pengajuan awal sudah mudah dan setiap panitia atau desa bisa bertanya kepadanya mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Setelah diajukan oleh para pendaftar, seleksi penerima bantuan program rumah sederhana layak huni akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu sesuai dengan kuota yang ditentukan pemerintah. Tim Verifikasi akan melakukan survei untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, seperti yang disampaikan oleh Ayyub Bakar, Kasi Kesra Desa Bilante.

*“Menurut pandangan saya, pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan sejak awal. Meskipun saat ini terdapat kendala dalam hal anggaran, namun program ini sangat baik dan patut untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dan menambah anggaran untuk program ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.”*<sup>20</sup>

Menurut Ayyub Akbar, Kasi Kesra Desa Bilante, program bantuan rumah sederhana layak huni sudah tepat sasarannya. Bantuan ini diberikan hanya pada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya berdasarkan kondisi fisik rumah, tetapi juga latar belakang ekonomi mereka. Adanya orang yang memiliki

---

<sup>19</sup>Endang, Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 2023

<sup>20</sup>Ayyub Bakar. Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

rumah yang tidak layak huni namun memiliki simpanan sapi dan sawah, juga menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan<sup>21</sup>

Untuk memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni ini tepat sasaran, verifikasi dilakukan di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan informasi dengan mewawancarai salah satu panitia program, Miftahul Ma'wa, selaku bendahara. Ia menyatakan bahwa menurut pandangan pribadinya, program sudah tepat sasaran karena telah melalui proses pengambilan keputusan oleh aparat desa dan musdes, dan melalui rapat yang membahas siapa saja yang layak menerima bantuan<sup>22</sup>

Namun, Ibu Hartina sebagai penerima program bantuan rumah sederhana layak huni, menyatakan bahwa:

*“Dalam penerimaan program bantuan rumah sederhana layak huni, terdapat masalah yang terjadi, di mana orang yang dekat dengan panitia atau orang desa lebih memiliki kesempatan untuk menerima bantuan. Padahal, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan lebih mendesak, yaitu mereka yang rumahnya sangat tidak layak huni.”<sup>23</sup>*

Untuk memastikan pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni tepat sasaran dan efektif, diperlukan prosedur pelaksanaan yang jelas dan teratur. Dengan memiliki mekanisme dan arahan yang jelas, pelaksanaan program dapat diatur dan dijalankan dengan benar, sehingga tidak mengalami penyimpangan.

---

<sup>21</sup>Ayyub Bakar. Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>22</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>23</sup> Hartina, Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

Untuk memastikan pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni tepat sasaran dan efektif, maka diperlukan prosedur pelaksanaan yang jelas dan arahan yang teratur. Sosialisasi juga sangat penting dilakukan untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, Endang menyatakan bahwa program ini sudah dikenal oleh masyarakat dan dibahas dalam musdes dan musrenbang tahun sebelumnya.

*“Program bantuan rumah sederhana layak huni sudah berlangsung sejak lama dan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Masyarakat sudah sangat familiar dengan program ini. Bahkan, melalui musdes dan musrenbang, program bantuan rumah sederhana layak huni telah dibahas dan diterapkan sejak tahun sebelumnya”.*<sup>24</sup>

Informan yang ditemui oleh peneliti membenarkan bahwa sosialisasi program bantuan rumah sederhana layak huni sudah dilakukan di daerah mereka. Ayyub Bakar, selaku Kasi Kesra Desa Bilante, menyebutkan bahwa sosialisasi dilakukan melalui musdes dan rapat, dan program tersebut sudah dikenal lama oleh masyarakat setempat.<sup>25</sup>

## **2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.**

Menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima program bedah rumah merupakan salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah. Kepala Seksi Pemerintahan, Andi Baso, menjelaskan

---

<sup>24</sup>Endang, Kepala Seksi Perumahan Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>25</sup>Ayyub Bakar. Kasi Kesra Desa Bilante, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

bahwa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima program ini begitu banyak sehingga membuat proses pemilihan penerima kurang tepat sasaran.

*“Menentukan masyarakat yang layak menerima program bedah rumah menjadi tantangan karena banyaknya kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini membuat khawatir bahwa pemberian bantuan bedah rumah mungkin tidak tepat sasaran karena kendala dalam proses seleksi”<sup>26</sup>*

Meskipun pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial warga, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bedah rumah. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah terus berupaya untuk memperhitungkan secara cermat dan memastikan bahwa program bedah rumah ini tepat sasaran dan mengatasi masalah keterlantaran masyarakat.

*“Walaupun kami selaku pemerintah desa sudah berusaha dengan optimal untuk memperhatikan kepentingan warga, masih ada beberapa halangan yang kami hadapi, seperti keterbatasan anggaran yang tidak selalu memadai untuk menutupi seluruh kegiatan program bedah rumah. Meskipun demikian, kami selaku pemerintah akan terus berusaha untuk mengatasi halangan ini dan memperbaiki kondisi warga kami.”<sup>27</sup>*

Menurut wawancara dengan Miftahul Ma'wa, Kaur Perencana Desa Bilante, dalam proses pelaksanaan bedah rumah, anggaran dana menjadi kendala utama. Setiap KK menerima dana sebesar 15 juta hingga 35 juta rupiah untuk membiayai pembelian bahan bangunan dan upah para pekerja. Oleh karena itu, perincian penggunaan dana harus jelas agar bisa diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan

*“Setiap KK dalam anggaran dana khusus untuk bedah rumah akan menerima sebanyak 15 juta hingga 35 juta rupiah. Alokasi dana tersebut harus digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah*

---

<sup>26</sup>Andi Baso, Kepala Seksi Pemerintahan, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

<sup>27</sup>Andi Baso, Kepala Seksi Pemerintahan, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023

*para pekerja, termasuk mandor, kepala tukang, dan pekerja yang melakukan pembedahan rumah”.*<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dana bedah rumah dilakukan dengan efisien. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan/materil bangunan dan upah tenaga kerja yang terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja. Tim pelaksana Kecamatan memainkan peran sebagai pengelola dana dan pelaksana kegiatan dengan baik.

### **C. Pembahasan**

Serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik lainnya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan publik. Kebijakan publik melibatkan banyak tahap dan proses, mulai dari identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pengumpulan informasi tentang masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat adalah tahap identifikasi masalah. Evaluasi alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi adalah tahap analisis kebijakan.<sup>29</sup>

Pada tahap pengembangan kebijakan, pemerintah atau institusi publik lainnya menentukan kebijakan yang akan diambil dan merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan

---

<sup>28</sup>Miftahul Ma'wa, Bendahara Panitia Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni, wawancara pada tanggal 29 Januari 2023

<sup>29</sup>Hermanto Suaib, et al. *Pengantar Kebijakan Publik*. (Jakarta: Humanities Genius, 2022). 67

penerapan kebijakan dalam praktiknya, dan evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan. Kebijakan publik dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan lingkungan, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan lain-lain. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di mana kita hidup, dan oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perkembangan dan implementasi kebijakan publik yang terjadi di sekitar kita.<sup>30</sup>

Program Rumah Layak Huni bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan memiliki tanah sendiri atau hibah. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Luwu sebagai pelaksana teknis di tingkat Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Pada setiap desa, dibentuk organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di desanya dan dibantu oleh BAPEMAS dalam sosialisasi, penyusunan daftar rencana kegiatan, dan pencairan dana bantuan rumah layak huni

Salah satu kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni adalah program layak huni. Implementasi program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah,

---

<sup>30</sup> Hadion Wijoyo. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2021). 25

lembaga keuangan, pengembang perumahan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Charles O' Jones, seorang akademisi terkenal dalam bidang kebijakan publik di Amerika Serikat, memiliki kontribusi penting dalam studi tentang implementasi kebijakan publik. Penelitian dalam mengukur implementasi program layak huni di Desa Bilante menggunakan teori kebijakan publik dari Charles O' Jones yang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu.

a. Organisasi

Struktur organisasi yang efektif diperlukan untuk mengimplementasikan program layak huni. Hal ini mencakup pembentukan tim dan jaringan kerja yang terdiri dari berbagai unit pemerintah dan sektor swasta untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul selama implementasi. Hasil wawancara yang dilakukan mengenai implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih kurang memuaskan. Pelaksanaan program hanya melibatkan panitia program bantuan rumah sederhana layak huni dan aparatur desa yang hanya melakukan pendataan. Sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan pihak-pihak lain yang terkait tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program.

Menurut teori Hogwood dan Gunn, kurangnya kerja sama dan partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong dapat dikategorikan sebagai Non Implementation. Hal ini menyebabkan program bantuan rumah sederhana layak



huni tidak dilaksanakan sesuai rencana dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan program.

Kondisi ini juga mempengaruhi hasil akhir dari program, sehingga masih banyak rumah yang dibangun tetapi tidak layak untuk dihuni. Ini bisa dikategorikan sebagai *Unsuccessful Implementation*, karena meskipun program dilaksanakan sesuai rencana, namun karena faktor-faktor eksternal seperti kurangnya kerja sama pihak-pihak terkait, program tersebut tidak berhasil memberikan dampak yang diinginkan..<sup>31</sup>

Program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong mengalami kegagalan implementasi. Peneliti mencatat bahwa meskipun program sudah berjalan, namun tidak sejalan dengan rencana dan masih ada banyak pelaksana yang belum bekerja dengan optimal. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi buruk.

Namun, peneliti menemukan bahwa kemampuan pelaksana program bantuan rumah sederhana layak huni cukup baik. Pelaksana harus mampu memverifikasi dan membantu pendaftar dalam proses pendaftaran serta menguasai komputer. Sayangnya, perangkat desa dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum memberikan dukungan yang optimal. Ini membuat panitia program bantuan rumah sederhana layak huni mengalami kesulitan saat melaksanakan program.

---

<sup>31</sup> Abdul, Kartini Maharani. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9.1 (2019): 78

Untuk mempermudah pelaksanaan program, perlengkapan kerja yang memadai juga sangat penting. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program bantuan rumah sederhana layak huni seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat keputusan kepanitiaan bedah rumah, dan lain-lain, dirasa cukup mempermudah para pendaftar. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus memberikan dukungan yang memadai bagi pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni.

b. Interpretasi

Evaluasi pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni pada tahap interpretasi harus memperhatikan apakah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam organisasi melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penilai mengungkapkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses implementasi adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa panitia program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante memegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara Dinas Perumahan memiliki peran sebagai pemantau dan pengawas, memastikan bahwa pekerjaan di lapangan sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja dan tidak ada penyimpangan. Kinerja panitia program terlihat baik dan sudah berjalan dengan lancar.

Untuk menjamin pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni yang sukses dan memberikan dampak positif pada masyarakat, kinerja dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam program tersebut harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, apabila kinerja mereka tidak memenuhi standar, hal ini dapat mempengaruhi negatif pelaksanaan program. Oleh karena itu, peneliti sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja orang-orang yang bertanggung jawab dalam program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante.

Peneliti menemukan bahwa kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong belum optimal. Mereka kurang membantu panitia dalam pelaksanaan program dan hanya turun ke lapangan saat survei. Hal ini menyebabkan pelaksana, yaitu panitia program bantuan rumah sederhana layak huni, mengalami kesulitan dalam melaksanakan program tersebut.

Untuk memperbaiki kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni, perlu dilakukan tindak lanjut seperti memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara panitia dan dinas terkait, memastikan bahwa dinas terlibat aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program, dan memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan dapat digunakan secara efektif.

Dengan melakukan tindak lanjut ini, diharapkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni dapat meningkat dan program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari program tersebut.

Panitia program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante sudah membuktikan tanggung jawab mereka melalui pelaksanaan program yang efektif. Namun, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum memberikan dukungan yang cukup untuk membantu pelaksanaan program. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menggerakkan partisipasi dari pihak terkait dan meningkatkan anggaran untuk program ini. Koordinasi antar pihak terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Desa Bilante, panitia program, dan Badan Keuangan Daerah sangat penting untuk menjaga kelancaran program dan memastikan tepat sasaran. Koordinasi yang baik dan harmonis antar pihak akan membantu dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni secara baik dan tepat sasaran.

Kemudian, dalam melakukan koordinasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, seperti ketersediaan sumber daya, kualitas bahan baku, dan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini akan membantu dalam menentukan strategi yang tepat dan memastikan bahwa pelaksanaan program

bantuan rumah sederhana layak huni berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan melakukan koordinasi yang baik dan mengutamakan kualitas pelaksanaan program, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi yang baik dan tepat waktu akan membantu mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program dan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan harapan masyarakat.

Program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong memang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memiliki masalah rumah layak huni. Keberadaan program ini sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun penerima bantuan harus membayar tukang sendiri, namun mereka dapat menikmati bantuan dari masyarakat yang dengan senang hati melakukan gotong royong untuk merehab rumah mereka. Dalam pelaksanaannya, dapat terlihat adanya rasa gotong royong dan kesetiakawanan dari masyarakat yang membantu. Masyarakat Desa Bilante sangat menghormati program ini dan memahami bahwa esensi dari program ini adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.

Namun, meskipun sudah terlihat rasa gotong royong dan kesetiakawanan dari masyarakat, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa

Bilante. Salah satunya adalah pengaturan biaya tukang yang harus ditanggung oleh penerima bantuan. Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan rumah sederhana layak huni harus mempertimbangkan hal ini dan memberikan solusi yang tepat untuk membantu penerima bantuan dalam hal ini. Hal ini akan memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

Selain itu, evaluasi berkala juga penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan program bantuan rumah sederhana layak huni. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya, serta memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat. Evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperbaikinya.

Dengan melakukan evaluasi berkala, pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan rumah sederhana layak huni dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya. Evaluasi juga membantu dalam menentukan arah dan tindakan yang tepat untuk memperbaiki pelaksanaan program, sehingga program bantuan rumah sederhana layak huni dapat berjalan dengan efektif dan membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

### c. Penerapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, program bantuan rumah sederhana layak huni memiliki persyaratan yang mudah dipenuhi oleh para pendaftar. Ini dikarenakan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak, seperti proposal pengajuan, fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat keputusan kepanitiaan bedah rumah, dan bukti kepemilikan tanah. Walaupun demikian, peneliti mencatat bahwa program ini belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, agar program bantuan rumah sederhana layak huni tetap berlanjut, diperlukan bantuan dana dari APBD Kabupaten Luwu.

Agar penerapan program bantuan rumah sederhana layak huni dapat berjalan secara optimal, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, serta prosedur kerja yang baik dan jadwal kegiatan yang teratur. Ini akan membantu para pelaksana program untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan, tahun berikutnya program bantuan rumah sederhana layak huni dapat terus berlanjut dengan dukungan dana yang berasal tidak hanya dari APBD Kota, tetapi juga dari sumber lain. Panitia pembentukan dari tingkat Desa/Kelurahan melakukan pendataan dan penetapan rumah tidak layak huni sebagai dasar pengajuan permohonan bantuan ke DPKPP. DPKPP melakukan verifikasi lapangan dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat miskin yang membutuhkan. Bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Bilante Kecamatan Larompong sudah sesuai dengan sarannya, yaitu membantu

masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Perangkat Desa juga turut serta dalam penentuan penerima bantuan rumah layak huni. Ini merupakan upaya untuk membantu Pemerintah Kecamatan Larompong mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki rumah yang layak huni.

Dengan demikian, program bantuan rumah sederhana layak huni memegang peran penting dalam membantu masyarakat miskin memiliki rumah yang layak huni. Program ini harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, serta dukungan dana yang memadai dan sumber daya yang cukup. Evaluasi yang terus-menerus dilakukan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni berjalan dengan baik dan membantu masyarakat miskin memiliki rumah yang layak huni.

Dalam program bantuan rumah sederhana layak huni yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu, bantuan yang diberikan berupa dana sebesar Rp. 15.000.000,- hingga Rp. 35.000.000,- yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu. Hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menentukan jumlah dana yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, perlu adanya perhatian dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu dalam memperhatikan upah tenaga kerja dan memasukkannya dalam Rancangan Anggaran Belanja. Tenaga



kerja yang digunakan dalam program bantuan rumah sederhana layak huni biasanya dibiayai oleh penerima bantuan program.

Peneliti juga melihat bahwa panitia program bantuan rumah sederhana layak huni seringkali memberikan kontribusi dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan uang. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan dana bantuan program bantuan rumah sederhana layak huni untuk membantu masyarakat yang masih memiliki rumah tidak layak huni, seperti di Desa Bilante Kecamatan Larompong. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program bantuan rumah sederhana layak huni.

Meskipun program bantuan rumah sederhana layak huni sudah dilaksanakan di Desa Bilante Kecamatan Larompong, namun implementasinya belum berjalan maksimal. Sosialisasi program hanya dilakukan pada saat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, tidak ada jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi pada setiap desa atau kelurahan. Selain itu, nominal bantuan yang diberikan oleh pemerintah dinilai belum tepat dan kadang-kadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga beberapa penerima bantuan harus menggunakan tabungan atau bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangannya. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Ibu Siani, salah satu penerima bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante. Pelaksanaan program juga tidak memiliki jadwal yang tepat, dan petunjuk teknis pelaksanaan tidak memiliki standar waktu untuk pencairan dana. Adanya ketidakpastian dan keterlambatan dalam proses

pencairan dana juga mempengaruhi jadwal perehaban rumah penerima bantuan, yang menjadi tidak jelas. Walaupun demikian, setiap program pasti memiliki kendala dalam pelaksanaannya, termasuk program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Bilante Kecamatan Larompong.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan panitia harus membuat jadwal sosialisasi yang tepat dan menentukan nominal bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pencairan dana berjalan dengan cepat dan efisien, sehingga jadwal perehaban rumah penerima bantuan tidak terhambat. Selain itu, pemerintah dan panitia juga harus memastikan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni akan berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya, yaitu memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat pun akan merasa terbantu dan memperoleh manfaat yang sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian data, diketahui bahwa pihak Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Bilante dan panitia program bantuan rumah sederhana layak huni di Dusun Barru, Desa Bilante, sangat mengharapkan bahwa program bantuan rumah sederhana layak huni ini dapat terus berlanjut. Hal ini dikarenakan masih banyak rumah yang tidak layak huni di Desa Bilante yang membutuhkan bantuan. Bantuan program rumah layak

huni juga harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga penerima bantuan tidak perlu meminjam uang atau bekerja untuk biaya perhaban rumah.

Peneliti juga melihat bahwa semua pihak yang terkait dengan program bantuan rumah layak huni harus terlibat, termasuk perangkat Desa. Perangkat Desa harus responsif dan memiliki kesadaran akan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, bukan hanya sekedar mencatat atau mendata.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi program, seperti sulitnya menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan, dan keterbatasan anggaran dana. Proses pencairan anggaran juga memakan waktu yang lama, sehingga proses pengajuan proposal ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah harus jelas perincian penggunaannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah dan panitia harus bekerja sama dan memastikan bahwa bantuan program rumah layak huni diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga harus mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mungkin muncul dalam implementasi program, seperti masalah pembagian bantuan dan keterbatasan anggaran dana.

Pemerintah dan panitia juga harus memastikan bahwa bantuan program rumah layak huni disalurkan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pengajuan proposal harus dilakukan

dengan cepat dan tepat waktu, dan anggaran dana harus disalurkan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dan panitia bisa memastikan bahwa program bantuan rumah layak huni dapat terus berlanjut dan memenuhi tujuannya. Ini akan membantu masyarakat Desa Bilante untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki rumah yang layak huni.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Menurut hasil penelitian dan observasi yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa,

1. Untuk mengukur implementasi program bantuan rumah layak huni, peneliti menggunakan teori evaluasi implementasi yang dikemukakan oleh Charles O'Jones terdiri dari tiga tahapan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Implementasi program bedah rumah di Desa Bilante Kecamatan Larompong mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun, pada saat pelaksanaannya, program tersebut masih mengalami beberapa hambatan. Dalam aspek organisasi, keterlibatan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program bedah rumah lebih banyak ditangani oleh panitia program bedah rumah yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Pada aspek interpretasi, Dinas Perumahan dan panitia program bedah rumah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bedah rumah. Kinerja panitia program bedah rumah di Desa Bilante cukup baik, namun kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan masih belum optimal. Mereka hanya turun ke lapangan pada saat survei saja dan belum membantu panitia program bedah rumah sepenuhnya dalam pelaksanaan program. Pada aspek penerapan

beberapa informan yang ditemui oleh peneliti memiliki pandangan bahwa nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat belum tepat. Nominal yang diberikan kadang-kadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga masih ada beberapa rumah yang sudah divedah namun kondisinya masih belum memenuhi standar.

2. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program bedah rumah oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Faktor yang membebani adalah kesulitan dalam menentukan siapa saja masyarakat yang berhak menerima program ini. Faktor lainnya adalah keterbatasan anggaran yang mempengaruhi proses pelaksanaan. Tahapan pencairan anggaran yang lama dan proses pengajuan proposal yang memakan waktu memperburuk situasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang disediakan dapat dikelola dengan baik dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki implementasi program bedah rumah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem penentuan penerima manfaat program bedah rumah sudah tepat dan adil. Ini bisa dilakukan dengan menentukan kriteria yang jelas dan transparan, serta melakukan verifikasi yang ketat.
2. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang disediakan cukup

untuk melaksanakan program bedah rumah dan dana tersebut tersedia tepat waktu. Ini bisa dilakukan dengan mempercepat tahapan pencairan anggaran dan memastikan bahwa proses pengajuan proposal berjalan dengan lancar.

3. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran dalam program bedah rumah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan laporan yang jelas dan detail tentang penggunaan dana, serta memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya.
4. Masyarakat perlu memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menerima bantuan bedah rumah. Ini memastikan bahwa program berjalan dengan lancar dan transparan.

Dengan memperhatikan saran-saran ini, diharapkan program bedah rumah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kartini Maharani. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9.1 (2019): 78
- Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Ahmad, Nawi, and Asih Widi Lestari. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 7.1 (2019)
- Ardito, Bhinadi. *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Arfiani, Devi. *Berantas Kemiskinan*. Jakarta: Alprin, 2020
- Arif, Ginanjar. "Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang." *Journal of Government and Civil Society* 3.2 (2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya :CV Mahkota, EdisiRevisi, 2019.
- Desmawan, Deris. *Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021
- Ering, Merry Cintamy, Wilson Bogar, and Fitri Mamonto. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon." *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)* 2.2 (2021).
- Ismi, Anisa. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 9 (2021)
- Kembuan, Tabita Yudea, Jenny Nelly Matheosz, and Maria Heny Pratiknjo. "Kehidupan Pengamen Jalan Di Kawasan Boulevard Kota Manado." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* (2021)
- Khomsan, Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019
- Khotimah, Khusnul. *Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018: 78.



- Mary, Ismowati, and Ahmad Subhan. "Implementasi program pemberdayaan sosial kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di kabupaten Pandeglang." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1.2 (2018)
- Nalatissifa, Hiya, and Yudi Ramdhani. "Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 19.2 (2020): 246-256.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018
- Nurani, Dwi, *Analisis Implementasi*, Jakarta: FISIP UI, 2019
- Pasolong, Harbani. *Teori Administra Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Roebyantho, Haryati, and Nunung Unayah. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat." *Sosio Konsepsia* (2019)
- Sofian, Alif. "Analisis Penyaluran Program RTLH dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang." *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 1.1 (2022)
- Suaib, Hermanto, et al. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Humanities Genius, 2022
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Sugihartono, Tri. "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web." *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)* 7.1 (2018): 52-56.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Syaputra, Doni Aprianto. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Kommunity Online* 1.2 (2021)
- Unafti, Annisa, and Rahmat Salam. "Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada Kelurahan Parung Serab di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* (2022)
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021

Wargadinata, Wildana. *Islam dan pengentasan kemiskinan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019

Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021

Wijoyo, Hadion. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2021

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pt. Buku Kita, 2019

Yusuf, Adhi Purnama. "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor." *Karimah Tauhid* 1.3 (2022)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1. Surat Izin Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 042/PENELITIAN/02.07/DPMPTSP/II/2023  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Bilante  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B21/In.19/FEBI.04/KS.02/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yesi Rusman  
Tempat/Tgl Lahir : Lalento / 25 Juni 2000  
Nim : 19 0401 0218  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Dsn. Baru  
Desa Bilante  
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA BILANTE KECAMATAN  
LAROMPONG KABUPATEN LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA BILANTE**, pada tanggal **27 Januari 2023 s/d 27 Februari 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 4 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 27 Januari 2023  
Kepala Dinas

**Drs. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19681231 199203 1 091

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Yesi Rusman;
5. Arsip.

## *Lampiran 2: Pedoman Wawancara*

### **A. Pedoman wawancara dengan Aparat Desa:**

1. Data informasi
  - a. Nama :
  - b. Jenis kelamin :
  - c. Umur :
  - d. Jabatan :
  - e. Pendidikan terakhir :
2. Kebijakan Publik
  - a. Bagaimana efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante? Apakah ada bukti konkret atau data yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan setelah implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni?
  - b. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini? Apakah ada upaya konkret untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program bantuan rumah, serta pemantauan dan evaluasi program tersebut?
3. Program Bantuan Rumah Layak Huni
  - a. Apakah program bantuan rumah layak huni telah berhasil meningkatkan kondisi hunian masyarakat di Desa Bilante? Dapatkah Anda memberikan contoh perubahan konkret dalam kondisi rumah penerima bantuan setelah program ini diimplementasikan?
  - b. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap program ini? Apakah mereka merasa bahwa rumah yang mereka terima memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka?
4. Kemiskinan
  - a. Berapa pendapatan kepala keluarga yang masuk kategori sebagai penerima bantuan?

b. Kenapa tidak semua orang miskin dapat bantuan?

5. Survey dan Identifikasi

a. Apakah aparat desa telah melakukan survey dan identifikasi secara komprehensif terhadap tingkat kemiskinan di Desa Bilante? Bagaimana metode yang digunakan dalam survey ini, dan apakah data yang terkumpul telah dianalisis dengan baik untuk memahami profil kemiskinan di desa ini?

b. Bagaimana aparat desa menggunakan hasil survey dan identifikasi untuk merumuskan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif? Apakah terdapat langkah konkret yang diambil berdasarkan temuan dan analisis dari survey tersebut, seperti mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling rentan dan merumuskan program-target yang sesuai dengan kebutuhan mereka?

6. Verifikasi dan Seleksi Penerima Manfaat

a. Bagaimana aparat desa melakukan proses verifikasi terhadap calon penerima manfaat Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni? Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan tersebut?

b. Apakah ada mekanisme seleksi yang adil dan transparan yang diterapkan dalam penentuan penerima manfaat Program Bantuan Rumah? Bagaimana aparat desa memastikan bahwa proses seleksi tidak didasarkan pada preferensi pribadi atau diskriminasi, melainkan berdasarkan kriteria objektif dan kesetaraan kesempatan bagi semua calon penerima?

7. Penyaluran Bantuan

a. Bagaimana proses penyaluran bantuan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dilakukan oleh aparat desa? Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat waktu, efisien, dan transparan kepada penerima manfaat?

- b. Apakah aparat desa telah mengimplementasikan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan? Bagaimana aparat desa memastikan bahwa bantuan diterima oleh penerima yang memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan program, serta mengatasi potensi kebocoran atau penyalahgunaan bantuan?

8. Monitoring dan Evaluasi

- a. Apakah Anda merasa ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan program bantuan rumah layak huni yang Anda terima? Jika ya, mohon jelaskan bagaimana mekanisme tersebut berfungsi dan apakah Anda merasa terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi.
- b. Apakah Anda melihat adanya perbaikan atau peningkatan dalam program bantuan rumah layak huni sejak Anda menerimanya? Jika ya, mohon berikan contoh konkret perbaikan yang telah terjadi. Jika tidak, apa yang menurut Anda dapat dilakukan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program ini agar lebih efektif dalam mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan?

**B. Pedoman Wawancara dengan Masyarakat**

1. Data informasi

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan terakhir :

2. Implementasi

- a. Sejauh mana Anda merasa terlibat dalam proses implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Bilante? Apakah ada

mekanisme atau forum yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program ini?

- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah? Apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup tentang mekanisme seleksi penerima, proses pembangunan rumah, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program ini?
- c. Apakah Anda melihat adanya perubahan atau peningkatan dalam kondisi hunian masyarakat di Desa Bilante sejak implementasi Program Bantuan Rumah? Bagaimana program ini memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas Anda?

### 3. Kemiskinan

- a. Menurut Anda, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Desa Bilante? Apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengatasi masalah kemiskinan ini?
- b. Bagaimana dampak tingkat kemiskinan di Desa Bilante terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja? Apakah ada hambatan atau kendala khusus yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan ekonomi?
- c. Apakah masyarakat di Desa Bilante merasa adanya program-program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan? Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, seperti pelatihan keterampilan atau program pengembangan usaha mikro?



### Lampiran 3. SK Penguji



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 106 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi.  
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.



Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
- Ketiga : Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keenam : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

a.n. Rektor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



embusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Pertiagal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 106 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO

---

I. Nama Mahasiswa : Yesi Rusman  
NIM : 19 0401 0218  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Larompong)**

III. Dosen Pembimbing dan Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Pembimbing : Agung Zulkarnain, S.E., M.E.  
Penguji Utama (I) : Nurdin Batjo, S.Pt., M.M  
Pembantu Penguji (II) : Mursyid, S.Pd., M.M.

Palopo, 23 Februari 2023

a.n. Rektor  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*Lampiran 4. Halaman Persetujuan Pembimbing*

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu).

Yang ditulis oleh :

Nama : Yesi Rusman  
Nim : 19 0401 0218  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,

2023

  
Agung Zulkarnain, S.E., M.E

## *Lampiran 5. Nota Dinas Pembimbing*

### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. : 1 (Satu) skripsi

Hal : skripsi an. Yesi Rusman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Yesi Rusman  
NIM : 1904010218  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,

  
Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.E

Tanggal :

## Lampiran 6. Halalam Persetujuan Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ) yang ditulis oleh Yesi Rusman NIM 19 0401 0218 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada hari Senin tanggal 06 bulan Maret Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S. H., M. H.  
Ketua Sidang

(  )  
Tanggal:

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.  
Sekretaris Sidang

(  )  
Tanggal:

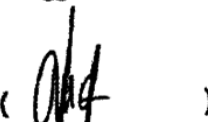
3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.  
Penguji I

(  )  
Tanggal:

4. Mursyid, S.Pd., M.M.  
Penguji II

(  )  
Tanggal:

5. Agung Zulkarnain S.E., M.Ei.  
Pembimbing Utama

(  )  
Tanggal:

## Lampiran 7. Nota Dinas Tim Penguji

Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.  
Mursyid, S.Pd., M.M.  
Agung Zulkarnain, S.E., M.Ei.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : skripsi an. Yesi Rusman  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yesi Rusman  
NIM. : 1904010218  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu )

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.

Penguji I

  
Tanggal:

2. Mursyid, S.Pd., M.M.

Penguji II

  
Tanggal:

3. Agung Zulkarnain, S.E., M.Ei.  
Pembimbing Utama

  
Tanggal:

## Lampiran 8. Nota Dinas Tim Verifikasi

### TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

#### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

#### NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi  
Hal : skripsi an. Yesi Rusman  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Yesi Rusman  
NIM : 1904010218  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Iwuu).

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

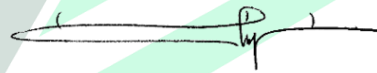
1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E

Tanggal : 14 Maret 2023

2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : 21 Maret 2023

(  )

(  )

## Lampiran 9. Turnitin

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI DESA BILANTE KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU)

#### ORIGINALITY REPORT

**23%** SIMILARITY INDEX  
**23%** INTERNET SOURCES  
**7%** PUBLICATIONS  
**3%** STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://koranseruya.com">koranseruya.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ejournal.uniks.ac.id">ejournal.uniks.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id">bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%



*Lampiran 10: Dokumentasi*





## RIWAYAT HIDUP



**Yesi Rusman**, lahir di Lalento pada tanggal 25 Juni 2000.

Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Rusman Yamin dan ibu Lismayana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Barru Desa Bilante Kecamatan Larompomg Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis

diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 468 Bilante. Kemudian di tahun yang sama menempu Pendidikan di MTS Keppe hingga tahun 2015 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu dan pada saat menempuh pendidikan di SMAN 3 Luwu penulis aktif di kegiatan Ekstrakurikuler yaitu Pramuka. Penulis menyelesaikan studi di tahun 2018 dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.